



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN KEUANGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2019

AUDITED



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sagan III/4 Telp. (0274) 512386. Fax. (0274) 560386

YOGYAKARTA

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan, menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 99 yang menyebutkan bahwa :

1. Kepala OPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
2. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan OPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran barang yang dikelolanya
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Kepala OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara ringkas Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran Tahun Anggaran 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian sbb :

A. Pendapatan pada Tahun Anggaran 2019

ditetapkan sebesar	Rp. 1.579.205.000,00
realisasinya mencapai sebesar	<u>Rp. 1.615.078.500,00</u>
sehingga lebih dari target sebesar atau sebesar 102,27%	Rp. 35.873.500,00

B. Belanja pada Tahun Anggaran 2019

ditetapkan sebesar	Rp. 31.929.614.519,00
realisasinya mencapai sebesar	<u>Rp. 29.681.303.942,00</u>
sehingga kurang dari anggaran sebesar atau sebesar 92,96 %.	Rp. 2.248.310.577,00

C. Surplus/(Defisit) Anggaran ditetapkan defisit sebesar Rp. 30.350.409.519,00 dengan realisasi defisit sebesar Rp. 28.066.225.442,00 atau sebesar 92,47 %.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2019.

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 sebesar	Rp.	172.448.162.755,68
yang terdiri dari :		
Aset Lancar sebesar	Rp.	892.218.292,00
Investasi Jangka Pendek sebesar	Rp.	0
Aset Tetap sebesar	Rp.	170.697.224.201,68
Dana Cadangan sebesar	Rp.	0
dan Aset Lainnya sebesar	Rp.	858.720.262,00
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar	Rp.	72.935.773,00
yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar	Rp.	72.935.773,00
serta Kewajiban Jangka Panjang sebesar	Rp.	0
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar	Rp.	172.375.226.982,68

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan-LO terdiri dari :	Rp.	1.615.078.500,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp.	1.569.734.500,00
Pendapatan Transfer - LO	Rp.	0
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	Rp.	45.344.000,00
Beban, terdiri dari :	Rp.	34.882.918.218,35
Beban Operasi	Rp.	34.882.918.218,35
Surplus/Defisit Operasional	Rp.	(33.267.839.718,35)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp.	169.345.561.006,56
Surplus Laporan Operasional	Rp.	(33.267.839.718,35)
RK PPKD	Rp.	28.066.225.442,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	8.231.280.252,47
Ekuitas Akhir	Rp.	172.375.226.982,68

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 19641103199102 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 125) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20189 Nomor 36);
23. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 73);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Aset
 - 3.1.4 Kewajiban
 - 3.1.5 Ekuitas
 - 3.1.6 Pendapatan-LO
 - 3.1.7 Beban
 - 3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non keuangan

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang) (Rp)	Prosentase %
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PENDAPATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.579.205.000,00	1.615.078.500,00	35.873.500,00	102,27 %
Hasil Retribusi Daerah	1.540.205.000,00	1.569.734.500,00	29.529.500,00	101,91 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.000.000,00	45.344.000,00	6.344.000,00	116,26 %
BELANJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.378.165.899,00	7.079.404.601,00	(298.761.298,00)	95,95 %
Belanja Pegawai	7.378.165.899,00	7.079.404.601,00	(298.761.298,00)	95,95 %
BELANJA LANGSUNG	24.551.448.620,00	22.601.899.341,00	(1.949.549.279,00)	92,05 %
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.209.772.427,00	3.944.000.673,00	(265.771.754,00)	93,68 %
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.933.928.496,00	4.524.312.141,00	(409.616.355,00)	91,69 %
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	441.722.200,00	439.010.800,00	(2.711.400,00)	99,38 %
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	3.956.016.000,00	3.734.617.800,00	(221.398.200,00)	94,40 %
PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN	178.000.000,00	166.264.294,00	(11.735.706,00)	93,40 %
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	1.718.546.500,00	1.586.008.550,00	(132.537.950,00)	92,28 %

ROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	4.565.336.600,00	3.987.939.342,00	(577.397.258,00)	87,35 %
PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	985.792.500,00	791.335.548,00	(194.456.952,00)	80,27 %
PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.562.333.897,00	3.428.410.193,00	(133.923.704,00)	96,24 %

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli daerah (PAD) sehingga kami dituntut untuk mengoptimalkan potensi yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari usaha perikanan maupun pelayanan jasa perikanan. Selama ini tidak ada hambatan yang mengganggu kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga dapat melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan juga tidak mengalami kendala yang berarti sehingga realisasi penyerapan anggaran mencapai 92,96% dari anggaran Rp31.929.614.519,00 dapat terealisasi Rp. 29.681.303.942,00.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

	2019	2018 (Audited)
3.1.1 <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp.1.615.078.500,00</u>	<u>Rp. 1.473.284.875,00</u>

Pendapatan-LRA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.1.579.205.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.615.078.500,00 atau 102,27% dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1 <u>Hasil Retribusi Daerah – LRA</u>	<u>Rp.1.569.734.500,00</u>	<u>Rp. 1.460.989.0000,00</u>
----------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 1.540.205.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.569.734.500,00 atau 101.92 % dengan rincian sebagai berikut: Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.180.000,00	39.705.000,00	164,21
2.	Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan	43.775.000,00	47.652.500,00	108,86
3.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.472.250.000,00	1.482.377.000,00	100,69
	Jumlah	1.540.205.000,00	1.569.734.500,00	101,92

Lain-lain Pendapatan

3.1.1.2 <u>Asli Daerah Yang Sah – LRA</u>	<u>Rp. 45.344.000,00</u>	<u>Rp. 12.295.875,00</u>
--------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 39.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 45.344.000,00 atau 116,27 % dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Dari Pengelolaan Barang Milik Daerah.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penggunaan Asrama	0,00	3.712.000,00	0,00
2.	Penggunaan Aula	0,00	700.000,00	0,00
3.	Sewa Bangunan untuk kantin	0,00	6.600.000,00	0,00
4.	Sewa Fasilitas Pendingin Hasil Perikanan (cold storage)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Jumlah	30.000.000,00	41.012.000,00	136,71

Lain-Lain				
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Surat Keterangan Asal Ikan	5.000.000,00	4.332.000,00	86,64
2.	Sewa Kamar	3.500.000,00	0,00	0,00
3.	Sewa Aula	500.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.000.000,00	4.332.000,00	48,13

3.1.2 Belanja **Rp. 29.681.303.942,00** **Rp. 22.680.312.808,00**

Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 31.929.614.519,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.681.303.942,00 atau 92,96 %. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1 Belanja Operasi **Rp.25.944.363.683,00** **Rp.21.674.708.208,00**

Belanja Operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.27.783.581.023,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.944.363.683,00 atau 93,38 %, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai **Rp.9.780.885.581,00** **Rp.9.440.082.456,00**

Belanja Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.10.274.934.259,00 dan realisasi sebesar Rp.9.780.885.581,00 atau 95,19 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan-LRA			
a.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LRA	5.950.675.108,00	5.713.400.497,00	96,01
b.	Tunjangan Keluarga-LRA	551.019.910,00	530.445.579,00	96,27
c.	Tunjangan Jabatan-LRA	278.970.000,00	267.270.000,00	95,81
d.	Tunjangan Fungsional-LRA	19.800.000,00	19.620.000,00	99,09
e.	Tunjangan Fungsional Umum-LRA	239.325.578,00	225.135.000,00	94,07
f.	Tunjangan Beras-LRA	273.250.621,00	261.653.460,00	95,76
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LRA	18.826.746,00	15.863.313,00	84,26
h.	Pembulatan Gaji-LRA	91.786,00	71.002,00	77,36
	Jumlah	7.331.959.749,00	7.033.458.851,00	95,93
2.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LRA			
a.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-LRA	46.206.150,00	45.945.750,00	99,44
	Jumlah	46.206.150,00	45.945.750,00	99,44

3.	Honorarium PNS			
a.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	125.910.000,00	125.410.000,00	99,60
b.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	26.730.000,00	22.300.000,00	83,43
c.	Honorarium Pengelola Keuangan	133.740.000,00	126.595.000,00	94,66
d.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	6.150.000,00	85,42
e.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	625.000,00	625.000,00	100,00
f.	Honorarium Perencanaan Program	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	Jumlah	303.205.000,00	290.080.000,00	95,67
4.	Honorarium Non PNS			
a.	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	1.230.843.360,00	1.114.620.980,00	90,79
b.	Honorarium Harian Non PNS	1.362.720.000,00	1.296.780.000,00	95,16
	Jumlah	2.593.563.360,00	2.411.400.980,00	92,73
	Jumlah Belanja Pegawai – LRA	10.274.934.259,00	9.780.885.581,00	95,,19

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.16.163.478.102,00 Rp. 12.234.625.752 ,00

Belanja Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 17.508.646.764,00 dan realisasi sebesar Rp.16.163.478.102,00 atau 92,32 %, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Bahan Pakai Habis			
a.	Belanja Alat Tulis Kantor	186.371.800,00	184.575.300,00	99,04
b.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	73.203.600,00	73.143.600,00	99,92
c.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	13.635.000,00	13.635.000,00	100,00
d.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	29.446.600,00	29.446.600,00	100,00
e.	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.040.000,00	8.040.000,00	100,00
	Jumlah	310.697.000,00	308.840.500,00	99,40
2.	Belanja Bahan/Material			
a.	Belanja Bibit Ternak	391.600.000,00	391.240.000,00	99,91
b.	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.376.000,00	20.369.000,00	99,97
c.	Belanja Bahan Kimia	183.071.150,00	182.482.250,00	99,68
d.	Belanja Persediaan Makanan pokok	2.001.270.000,00	1.942.866.700,00	97,08

e.	Belanja Bahan Percontohan	341.202.300,00	340.327.325,00	99,74
f.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	976.249.500,00	645.071.800,00	66,08
g.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	77.000.000,00	74.800.050,00	97,14
h.	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	40.322.200,00	40.322.200,00	100,00
i.	Belanja Bahan Pakan	12.266.000,00	12.266.000,00	100,00
	Jumlah	4.043.357.150,00	3.649.745.325,00	90,27
3.	Belanja Jasa Kantor			
a.	Belanja Telepon	23.500.000,00	9.349.639,00	39,79
b.	Belanja Air	42.600.000,00	27.319.500,00	64,13
c.	Belanja Listrik	978.503.610,00	889.279.078,00	90,88
d.	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.460.000,00	16.500.000,00	94,50
e.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
f.	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	600.000,00	50,00
g.	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
h.	Belanja Publikasi	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
i.	Belanja Analisa Laboratorium	28.000.000,00	25.750.800,00	91,97
j.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.142.263.957,00	1.092.183.722,00	95,62
k.	Belanja Retribusi/pajak	15.340.000,00	15.307.419,00	99,79
l.	Belanja Jasa Kebersihan kantor	517.014.000,00	513.890.160,00	99,40
	Jumlah	2.860.281.567,00	2.684.580.318,00	93,86
4.	Belanja Premi Asuransi			
a.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	5.100.000,00	2.835.600,00	55,60
b.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	38.832.000,00	20.926.500,00	53,89
	Jumlah	43.932.000,00	23.762.100,00	54,09
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
a.	Belanja Jasa Service	63.000.000,00	62.282.211,00	98,86
b.	Belanja Penggantian Suku Cadang	140.815.000,00	140.677.599,00	99,90
c.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	380.129.000,00	380.098.920,00	99,99
d.	Belanja Jasa KIR	1.750.000,00	1.069.500,00	61,11
e.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.825.000,00	24.907.700,00	75,88
	Jumlah	618.519.000,00	609.035.930,00	98,47

6.	Belanja Cetak Dan Penggandaan			
a.	Belanja Cetak	187.252.500,00	184.366.500,00	98,46
b.	Belanja Penggandaan	107.037.000,00	105.808.250,00	98,85
	Jumlah	294.289.500,00	290.174.750,00	98,60
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
a.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.250.000,00	29.500.000,00	97,52
b.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	120.900.000,00	103.850.000,00	85,90
	Jumlah	151.150.000,00	133.350.000,00	88,22
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
a.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	147.700.000,00	142.750.000,00	96,65
b.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	Jumlah	159.700.000,00	154.750.000,00	96,90
9.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor			
a.	Belanja Sewa Peralatan Display	18.900.000,00	18.795.000,00	99,44
	Jumlah	18.900.000,00	18.795.000,00	99,44
10.	Belanja Makanan dan Minuman			
a.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.456.000,00	576.000,00	16,67
b.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	291.644.000,00	274.074.000,00	93,98
c.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	771.770.000,00	771.770.000,00	100,00
	Jumlah	1.066.870.000,00	1.046.420.000,00	98,08
11.	Belanja Perjalanan Dinas			
a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	626.550.000,00	605.970.000,00	96,72
b.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	788.488.000,00	673.611.979,00	85,43
	Jumlah	1.415.038.000,00	1.279.581.979,00	90,43
12.	Belanja Pemeliharaan			
a.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287.905.047,00	287.748.000,00	99,95
b.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	242.862.000,00	242.630.500,00	99,90

c.	Belanja Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	23.750.000,00	23.000.000,00	96,84
	Jumlah	554.517.047,00	553.378.500,00	99,79
13.	Belanja Jasa Konsultansi			
a.	Belanja Jasa konsultansi Penelitian	153.918.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	153.918.000,00	0,00	0,00
14.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS			
a.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	193.500.000,00	163.500.000,00	84,50
	Jumlah	193.500.000,00	163.500.000,00	84,50
15.	Honorarium PNS			
a.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	943.680.000,00	866.080.000,00	91,78
	Jumlah	943.680.000,00	866.080.000,00	91,78
16.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			
a.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.680.297.500,00	4.381.483.700,00	93,62
	Jumlah	4.680.297.500,00	4.381.483.700,00	93,62
	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	17.508.646.764,00	16.163.478.102,00	92,32

3.1.2.2 Belanja Modal **Rp.3.736.940.259,00** **Rp 1.005.604.600,00**

Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.4.146.033.496,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.736.940.259,00 atau 90,13 %, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah **Rp0,00** **Rp0,00**

Tahun Anggaran 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak menganggarkan Belanja Modal Tanah sehingga tidak ada penambahan aset berupa tanah.

.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp. 844.513.923,00** **Rp. 96.604.100,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 854.526.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 844.513.923,00 atau 98,83 %, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
a.	Belanja Modal Pengadaan Pompa	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
a.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	122.163.000,00	120.510.000,00	98,65
a.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	122.148.000,00	120.510.000,00	85,54
b.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	332.102.000,00	327.530.075,00	98,62
a.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	153.750.000,00	152.150.000,00	98,96
b.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00
c.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	115.452.000,00	114.498.000,00	99,17
d.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.600.000,00	35.592.075,00	97,25
e.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	23.800.000,00	23.290.000,00	97,86
5.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	193.450.000,00	190.587.848,00	98,52
a.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	30.000.000,00	29.000.000,00	96,67
b.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	46.500.000,00	45.622.290,00	98,11
c.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	116.950.000,00	115.965.558,00	99,16
6.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	5.156.000,00	5.156.000,00	100,00
a.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.156.000,00	5.156.000,00	100,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	9.655.000,00	9.280.000,00	96,12
a.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	9.655.000,00	9.280.000,00	96,12
8.	Belanja Modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destruktive Testing Laboratory (BATAM)	153.000.000,00	152.450.000,00	99,54
a.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Hidrologi	153.000.000,00	152.450.000,00	99,64
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	854.526.000,00	844.513.923,00	98,83

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 844.513.923,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

3.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.1.839.197.336,00 Rp. 718.326.500,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 2.110.389.496,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.839.197.336,00 atau 87,15 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.110.389.496,00	1.839.197.336,00	87,15
a.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.959.081.496,00	1.689.457.336,00	86,24
b.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	125.872.000,00	124.740.000,00	99,10
c.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.436.000,00	25.000.000,00	98,29
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.110.389.496,00	1.839.197.336,00	87,15

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.839.197.336,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

3.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 1.053.229.000,00 Rp.190.674.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp. 1.181.118.000,00 dan realisasinya Rp. 1.053.229.000,00 atau sebesar 89,17 %

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	977.140.000,00	852.021.100,00	87,20
a.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	977.140.000,00	852.021.100,00	87,20
2.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	154.953.000,00	152.182.900,00	98,21
a.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	154.953.000,00	152.182.900,00	98,21

3.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	49.025.000,00	49.025.000,00	100,00
a.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
b.	Belanja Modal Pengadaan Pos dan Telekomunikasi	24.025.000,00	24.025.000,00	100,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.181.118.000,00	1.053.229.000,00	89,17

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan telah dicatat menambah aset Jalan,Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp. 1.053.229.000,00.

3.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Rp.0,00** **Rp. 0,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	-	-	-
a.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp.0,00

3.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya **Rp.0,00** **Rp.0,00**

Tahun Anggaran 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Lainnya

3.1.3 Aset

Aset Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.172.448.162.755,68 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.892.218.292,00 Aset Tetap sebesar Rp.170.697.224.201,68 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 858.720.262,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1 Aset Lancar Rp.892.218.292,00 Rp. 710.813.369,00

Aset Lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.892.218.292,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1 Kas dan Setara Kas Rp.0,00 Rp.0,00

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0,00

3.1.3.1.2 Piutang Pendapatan Rp.0,00 Rp.0,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00

3.1.3.1.3 Piutang Lainnya Rp.0,00 Rp.0,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00

3.1.3.1.4 Penyisihan Piutang Rp.0,00 Rp.0,00

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00

3.1.3.1.5 Persediaan Rp.892.218.292,00 Rp. 710.813.369,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 892.218.292,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2019 (Rp.)
1.	Persediaan Barang Konsumsi	125.293.828,00
	Persediaan Alat Tulis Kantor	52.653.150,00
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	29.495.078,00
	Persediaan Barang Cetakan	43.145.600,00
2.	Persediaan Barang Pakai Habis Sebagai Pendukung Kegiatan	230.818.352,00
	Persediaan Obat untuk hewan ternak dan ikan	44.292.367,00
	Persediaan Bahan pakan ikan	185.762.885,00
	Persediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	763.100,00
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	4.557.200,00
	Persediaan Peralatan Kantor/ Rumah Tangga /Alat Pembersih	4.557.200,00
4.	Persediaan Pita Cukai dan Leges	7.581.000,00
	Persediaan Benda Pos	7.581.000,00
5.	Persediaan Bahan Baku	175.693.912,00
	Persediaan Bahan Reagen dan Kimia Laboratorium	137.175.012,00
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	38.518.900,00
7.	Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau Diserahkan kepada Masyarakat	348.274.000,00
	Persediaan Benih dan calon induk ikan	348.274.000,00
	JUMLAH PERSEDIAAN	892.218.292,00

3.1.3.2 Aset Tetap **Rp. 170.697.224.201,68** **Rp. 167.967.374.389,54**

Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 170.697.224.201,68 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.2.1 Tanah **Rp. 13.892.166.000,00** **Rp.13.892.166.000,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 13.892.166.000,00 tidak ada penambahan tanah pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
1	Kolam Ikan	5.298.702.000,00
2	Tanah Untuk Bangunan Gedung	8.593.464.000,00
	Jumlah	.13.892.166.000,00

3.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin **Rp 18.671.866.674,18** **Rp.17.664.865.185,18**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 18.671.866.674,18 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp 9.574.969.157,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2019 sebesar Rp. 3.650.507.259,00 kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.0,00, Reklas dari Belanja Barang dan Jasa Angkutan darat Tak Bermotor sebesar Rp.0,00, Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 0,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00, Penyesuaian tahun 2019 bertambah Rp. 0,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 419.960.080,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp.204.251.240,00 reklasifikasi ke Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00 , penghapusan sebesar Rp. 0,00, Penyesuaian berkurang Rp. 215.708.840,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp. 6.167.708.738,00 berasal dari APBN Pusat berupa alat bengkel bermesin Rp.18.289.582,00 alat ukur Rp.17.095.000,00, alat-alat Pertanian Rp. 59.680.000,00, alat kantor dan rumah tangga Rp.49.060.682,00, alat – alat laboratorium Rp.34.627.102,00, Gedung dan Bangunan Rp.4.921.879.478,00, Irigasi Rp. 1.019.202.032,00, Instalansi Rp. 47.874.862,00 Ekstrakomtabel Rp.27.538.000,18

Hasil pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp. 27.538.000,18 sedangkan Peralatan dan Mesin yang disajikan secara ekstrakomtabel sebesar Rp.0,00, sedangkan peralatan dan mesin yang disajikan secara ekstrakomtabel keseluruhan sebesar Rp. 27.538.000,18

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 18.671.866.674,18 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
	Peralatan dan Mesin	
1	Alat-Alat Besar Darat	0,00
2	Alat-alat Bantu	771.704.704,98
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.218.501.057,00
4	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	1.738.500,00
5	Alat Bengkel Bermesin	1.144.225.193,00
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	115.236.718,00
7	Alat Ukur	74.347.434,00
8	Alat Pengolahan	507.285.633,00
9	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	66.382.000,00
10	Alat Kantor	811.744.584,00
11	Alat Rumah Tangga	3.696.353.611,00
12	Komputer	1.615.129.236,00
13	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	453.641.000,00
14	Alat Studio	755.329.198,00
15	Alat Komunikasi	370.062.897,00
16	Peralatan Pemancar	65.035.000,00
17	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00
18	Unit-Unit Laboratorium	2.121.799.908,20
19	Alat Peraga/Praktek Sekolah	14.839.000,00
20	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.950.000,00
21	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	38.810.000,00
22	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratori (BATAM)	478.050.000,00
23	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	13.420.000,00
24	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	95.355.000,00
25	Senjata Api	62.676.000,00
	Jumlah	18.671.866.674,18

Adapun rincian saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2019 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1	DKP Induk	11.283.035.657,00
2	PPP Sadeng	3.078.423.772,00
3	BTPPB	4.310.407.245,18
	Jumlah	18.671.866.674,18

3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan Rp. 72.562.143.887,98 Rp. 67.188.238.449,98

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 72.562.887,98 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp.629.983.000,00 berasal dari hasil Pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2019 sebesar Rp 629.983.000,00, kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.0,00 serta mutasi kurang ke Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 1.959.700.836,00, Penyesuaian tahun 2019 bertambah Rp0,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp.177.957.040,00 Penyesuaian berkurang Rp. 0,00

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp. 4.921.879.478

d. Ekstrakomtabel

Hasil pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp. 72.562.143.887,98,98 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.713.656.594,00
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.361.773.342,98
3.	Tugu Peringatan	1.457.463.951,00
4.	Rambu-Rambu	29.250.000,00
	Jumlah	72.562.143.887,98

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1	DKP Induk	23.554.969.617,00
2	PPP Sadeng	33.940.722.752,98
3	BPTPB	33.940.722.752,98
	Jumlah	72.562.143.887,98

3.1.3.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.115.490.671.978,00 Rp.112.463.894.248,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.115.490.671.978,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.3.026.777.730,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2019 sebesar Rp.1.053.229.000,00 kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00 serta ada reklasifikasi dari Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.959.700.836,00, Penyesuaian Tahun 2019 bertambah Rp. 0,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 reklasifikasi ke Aset tetap Lainnya/aset Renovasi sebesar Rp. 0,00 -Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00, penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp.1.067.076.894,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp. 115.490.671.978,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
1.	Jalan	5.394.275.853,00
2.	Jembatan	115.887.456,00
3.	Bangunan Air Irigasi	893.407.679,00
4.	Bangunan Air Pasang Surut	602.769.986,00
5.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	593.756.797,00
6.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	13.117.506.756,00
7.	Bangunan Air Bersih/Baku	2.289.316.321,00
8.	Bangunan Air Kotor	2.234.740.613,00

9.	Bangunan Air	83.979.628.327,00
10.	Instalasi Air Minum Bersih	871.529.902,00
11.	Instalasi Air Kotor	1.386.078.182,00
12.	Instalasi Pembangkit Listrik	-
13.	Instalasi Pengaman	2.826.750,00
14.	Jaringan Air Minum	84.717.060,00
15.	Jaringan Listrik	3.924.230.296,00
16.	Jaringan Telepon	-
	Jumlah	115.490.671.978,00

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1	DKP Induk	2.826.750,00
2	PPP Sadeng	97.551.758.695,00
3	BPTPB	17.936.086.533,00
	Jumlah	115.490.671.978,00

3.1.3.2.5 Aset Tetap Lainnya

Rp 392.770.500,00

Rp. 225.486.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.392.770.500,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 167.284.500,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2019 sebesar Rp.0,- terdiri dari belanja aset tetap Renovasi sebesar Rp. 167.284.500,00 hasil Reklas Gedung dan Bangunan Buku Perpustakaan sebesar Rp. 0,00 Reklas dari jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. .0,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp. 0,00 - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00, penghapusan Buku Perpustakaan sebesar Rp.33.081.000,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 392.770.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
1	Buku	36.049.500,00
2	Terbitan Berkala	1.142.500,00
3	Aset Tetap Renovasi	355.578.500,00
	Jumlah	392.770.500,00

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1	DKP Induk	28.810.000,00
2	PPP Sadeng	361.418.500,00
3	BPTPB	2.542.000,00
	Jumlah	392.770.500,00

3.1.3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.86.433.000,00 Rp 0,00

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 86.433.000,00 terdapat koreksi BPK berupa reklas dari ATB (DED) ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp. 86.433.000,00

No	Uraian	Jumlah
1.	DED Rehabilitasi Gedung Induk Kantor Dislautkan	86.433.000,00
	Jumlah	86.433.000,00

3.1.3.2.7 Akumulasi Penyusutan Rp. 50.398.827.838,48 Rp,43.467.275.493,62

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 50.398.827.838,48 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.178.539.602,48
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.143.899.137,45
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	21.075.630.227,73
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	758.871,22
	Jumlah	50.398.827.838,48

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1	DKP Induk	18.156.111.860,88
2	PPP Sadeng	21.843.768.892,91
3	BPTPB	10.398.947.084,64
	Jumlah	50.398.827.838,48

4.1.3.3 Aset Lainnya **Rp. 858.720.262,00** **Rp 716.086.879,02,00**

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.858.720.262,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.3.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga **Rp.0,00** **Rp.0,00**

Tidak ada Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019

3.1.3.3.2 Aset Tidak Berwujud **Rp. 668.613.500,00** **Rp. 471.686.500,00**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 668.613.500,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp.283.360.000,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2019 sebesar Rp 0,00, kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00, Akumulasi Penyusutan Barang yang dihapus Rp.0,00, hibah Rp.0,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang ATB sebesar Rp. 0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp.196.927.000,00 (Software).

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp.668.613.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Aset Tak Berwujud Lainnya	668.613,500,00
	Jumlah	668.613.500,00

Saldo Aset Tidak Berwujud terdiri dari Software Rp.376.349.500,00, Kajian 81.299.000,00, DED Rp. 0,00 Website Rp.132.432.000,00, Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp.78.533.000,00.

Adapun rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1	DKP Induk	642.131.500,00
2	PPP Sadeng	26.482.000,00
3	BPTPB	0,00
	Jumlah	668.613.500,00

3.1.3.3.2 Aset Lain-Lain **Rp. 243.062.078,51** **Rp. 244.400.379,02**

Aset lain-lain merupakan barang rusak berat yang diusulkan penghapusan dan belum ada SK Penghapusan sebesar Rp. 215.708.840,00 dan mutasi kurang karena penghapusan Rp.217.047.141,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp243.062.078,51 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Aset Lain-Lain	243.062.078,51
	Jumlah	243.062.078,51

3.1.4 Kewajiban **Rp. 72.935.773,00** **Rp. 48.713.631,00**

Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 72.935.773,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek **Rp. 72.935.773,00** **Rp.48.713.631,00**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.72.935.773,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **Rp.0,00** **Rp.0,00**

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 merupakan utang atas penerimaan potongan pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum diserahkan kepada pihak ketiga terkait meliputi Utang Pajak sebesar Rp.0,00

3.1.4.1.2 Utang Bunga **Rp.0,00** **Rp.0,00**

Tidak ada Utang Bunga per 31 Desember 2019

3.1.4.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang **Rp.0,00** **Rp.0,00**

Tidak ada Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019

3.1.4.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka **Rp.0,00** **Rp.0,00**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 merupakan penerimaan pembayaran dari Pihak Ketiga atas penggunaan aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2018 layanan/jasa belum dinikmati oleh pihak ketiga.

3.1.4.1.5 Utang Belanja Rp.72.935.773,00 Rp.48.713.631,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh OPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2019 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	850.400,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	72.085.373,00
3	Utang Belanja Modal	0,00
	Jumlah	72.935.773,00

3.1.4.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp.0,00 Rp.0,00

Tidak ada Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019

3.1.4.2 Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00 Rp.0,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.2.1 Utang Dalam Negeri Rp.0,00 Rp.0,00

Tidak ada Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2019

3.1.4.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya Rp.0,00 Rp.0,00

Tidak ada Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019

Ekuitas Rp.172.375.226.982,68 Rp.169.345.561.006,56

Saldo Ekuitas sebesar Rp. 172.375.226.982,68 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2019. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	169.345.561.006,56
	Surplus Defisit – LO	(33.267.839.718,35)
	Ekuitas SAL	0,00
	Ekuitas Dikonsolidasikan:	
	RK PPKD	28.066.225.442,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	8,231.280.252,47
	Jumlah	172.375.226.982,68

3.1.6 Pendapatan-LO Rp. 1.615.078.500,00 Rp.1.473.284.875,00

Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp.1.615.078.500,00 meliputi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp 1.569.734.500,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp. 45.344.000,00 dengan rincian pendapatan Retribusi – LO adalah sebagai berikut:

3.1.6.1 Pendapatan Retribusi – LO Rp. 1.569.734.500,00 Rp. 1.460.989,00
Realisasi Pendapatan Retribusi-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.569.734.500,00 terdiri dari pendapatan Retribusi-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 1.569.734.500,00.

Rincian Pendapatan Retribusi-LO adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	39.705.000,00
2.	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	47.652.500,00
3.	Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	1.482.377.000,00
	Jumlah	1.569.734.500,00

3.1.6.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 45.344.000,00 Rp.12.295.875,00
Yang Sah - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp 45.344.000,00 terdiri dari Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 45.344.000,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2019
.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa – LO	Rp. 41.012.000,00
2.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	Rp. 4.332.000,00
	Jumlah	Rp. 45.344.000,00

3.1.7 Beban Rp. 34.882.918.218,35 Rp. 44.363.478.324,30

Realisasi Beban Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.34.882.918.218,35 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1 Beban Operasi Rp. 34.882.918.218,35 Rp.44.363.478.324,00

Realisasi Beban Operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.34.882.918.218,35 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp.9.781.735.981,00 , Beban

Barang dan Jasa sebesar Rp.18.133.497.921,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.6.967.684.316,35 Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 0,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1.1 Beban Pegawai Rp. 9.781.735.981,00 Rp.9.440.082.456,00

Realisasi Beban Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 9.781.735.981,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	
a.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.714.159.737,00
b.	Tunjangan Keluarga	530.536.739,00
c.	Tunjangan Jabatan	267.270.000,00
d.	Tunjangan Fungsional	19.620.000,00
e.	Tunjangan Fungsional Umum	225.135.000,00
f.	Tunjangan Beras	261.653.460,00
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.863.313,00
h.	Pembulatan Gaji	71.002,00
	Jumlah	7.034.309.251,00
2.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
a.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha	45.945.750,00
	Jumlah	45.945.750,00
3.	Honorarium PNS	
a.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	125.410.000,00
b.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	22.300.000,00
c.	Honorarium Pengelola Keuangan	126.595.000,00
d.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	6.150.000,00
e.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	625.000,00
f.	Honorarium Perencana Program	9.000.000,00
	Jumlah	290.080.000,00
4.	Honorarium Non PNS	
a.	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	1.114.620.980,00
b.	Honorarium Harian Non PNS	1.296.780.000,00
	Jumlah	2.411.400.980,00
	Jumlah Beban Pegawai	9.781.735.981,00

3.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp. 18.133.497.921,00 Rp.14.808.318.301,00

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.18.133.497.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi
1.	Beban Bahan Pakai Habis	713.393.999,00
2.	Beban Persediaan Bahan /Material	7.814.061.655,00
3.	Beban Beban Jasa Kantor	2.707.952.060,00
4.	Beban Premi Asuransi	23.762.100,00
5.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	315.257.010,00
6.	Beban cetak dan Penggandaan	283.012.550,00
7.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	133.350.000,00
8.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	154.750.000,00
9.	Beban Sewa PerlengkapanDanPeralatan Kantor	18.795.000,00
10.	Beban Makanan dan Minuman	1.046.420.000,00
11.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00
12.	Beban Perjalanan Dinas	1.279.581.979,00
13.	Beban Pemeliharaan	402.091.873,00
14.	Beban Jasa Konsultansi	0,00
15.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek PNS	0,00
16.	Beban barang untuk dijual kepada masyarakat /pihak ketiga	2.211.489.695,00
17.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS	163.500.000,00
18.	Beban jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	866.080.000,00
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	18.133.497.921,00

3.1.7.1.3 Beban Penyusutan & Amortisasi Rp.6.967.684.316,35 Rp.20.115.077.567,30

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.967.684.316,35 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.115.412.431,17
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.452.897.959,01
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.399.373.926,17
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
5.	Beban Penyusutan Aset Renovasi	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.967.684.316,35

3.1.7.1.4 Beban Penyisihan Piutang Rp. 0,00 Rp. 0,00

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00

3.1.7.1.5 Beban Lain-lain**Rp. 0.00****Rp.0,00**

Realisasi Beban Lain-lain Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00

3.1.7.2**Surplus/Defisit
Operasional –LO****Rp. 33.267.839.718,35****Rp. 42.890.193.449,30**

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO sebesar Rp. 33.267.839.718,35 berasal dari Pendapatan - LO sebesar Rp 1.615.078.500.00 dikurangi Beban sebesar Rp. 34.882.918.218,35.

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas sebesar Rp Rp. 172.375.226.982,68 merupakan kekayaan bersih OPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban OPD pada tanggal 31 Desember 2019. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	169.345.561.006,56
	Surplus Defisit – LO	(33.267.839.718,35)
	RK PPKD	28.066.225.442,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	8.231.280.252,47
	Jumlah	172.375.226.982,68

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Berdasarkan paparan Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 pada saat penetapan Gubernur DIY tanggal 2 Agustus 2017 yang lalu Visi DIY ke depan adalah Menyongsong “ Abad Samudera Hindia” untuk kemuliaan martabat manusia jogja. Visi Gubernur dalam Lima tahun mendatang (2017-2022) adalah ‘Menyongsong” Abad Samudera Hindia” untuk kemuliaan Martabat Manusia jogja”. Kemuliaan martabat manusia jogja menyangkut Misi ‘Lima Kemuliaan” atau “Pancamulia”. Pancamulia dari visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Hidup,kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban.

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia jogja yang termaktub pada panca Mulia 1,2 dan 3.Melalui misi pertama ini Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek : Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan,akses infrastruktur dasar; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;

Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson); Peningkatan harmoni kehidupan sosial, Budaya dan politik yang memenuhi rasa aman,nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang Termaktub pada panca Mulia ke -4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan :

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui “strategi silang vertikal” (keterbukaan di internal SKPD) ‘strategi silang horisontal’ (keterbukaan antar SKPD). Dan “strategi silang heterarki” (gabungan keterbukaan vertikal dan

horizontal antar SKPD).

- b. Mendorong semangat “Perjumpaan” dan “Silang Kelembagaan” akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui “silang belajar” ke lembaga - lembaga lain baik didalam maupun diluar lembaga pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan “Trilogi SDM-DIY” atau “E2-K” yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS, Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY yang menyanggah pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban” karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM - DIY menyanggah pesan “kemuliaan” dalam pengertian bersatunya” pikiran mulia, niat mulia dan tindakan mulia” dalam rangka menciptakan SDM yang “berintegritas” yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas dalam konteks Trilogi SDM-nya menyanggah pesan adanya pergeseran mindset, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai “karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran”, melainkan menuju pada pembentukan”sikap” bahwa karya demokrasi DIY adalah “Karya yang dapat menjadi rujukan” bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga – lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi “rujukan”, maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, Yang merupakan hasil dari karya yang “diniati” untuk menjadi “ karya berkualitas tinggi”. Untuk itu membangun birokrasi dengan”Ruh budaya karya berkualitas tinggi” akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun Kedepan. Ketiga aspek “Trilogi SDM-DIY”, merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi. Adanya potensi yang besar tersebut menjadikan tantangan dan sekaligus peluang yang harus dicermati oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY. Peran dinas kelautan dan perikanan dapat menjadi punggawa karena kelautan merupakan wilayah kerjanya sesuai kewenangan bidang.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan perikanan DIY Tahun 2019 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2019 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan perikanan dan Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran dan disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Dinas Kelautan dan perikanan DIY Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2019 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan perikanan untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 196411031991021001